

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi NTB

1. Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak antara 115°45' - 119°10' BT dan antara 8°5' - 9°5' LS. Wilayahnya di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di selatan dengan Samudera Hindia, di timur dengan Selat Sepadan di barat dengan Selat Lombok. Luas wilayah keseluruhan adalah 49.32,19 Km² yang terdiri atas daratan 20.152,15 Km² dan lautan 29.159,04 Km². Dua buah pulau besar yaitu Pulau Lombok dengan luas wilayah daratan 4.738,70 Km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa 15.414,37 Km² (76,49%). Selain itu juga dikelilingi ratusan pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut diantaranya Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda, Pulau Kaung, dan Pulau Panjang. Panjang Pulau Lombok dari barat ke timur sekitar 80 km sedangkan Pulau Sumbawa dari barat ke timur sepanjang 300 km dan dari utara ke selatan sekitar 100 km.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena, terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis cukup menguntungkan. Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai dari arah Timur Tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik, merupakan

lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya Makasar), terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal: Bali-Komodo-Tanah Toraja.

Secara administratif NTB beribukota di Kota Mataram dan terdiri atas 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota. Lima di Pulau Lombok yaitu: Kota Mataram dengan luas wilayah 56,35 km atau 0,28% , Kabupaten Lombok Barat luasnya 872,90 Km² atau 8,18% , Kabupaten Lombok Tengah luasnya 1.427,65 Km² atau 7,08%, Lombok Timur seluas 1.605,55 Km² atau 7,97% dan Kabupaten Lombok Utara seluas 776,25 Km² untuk Kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 6.643,98 Km² atau 32,97%, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas wilayah 1.849,02 Km² atau 9,17% , Kabupaten Dompu dengan luas wilayah 2.324,60 atau 11,53%, Kabupaten Bima dengan luas wilayah 4.389,40 Km² atau 21,78% dan Kota Bima dengan luas wilayah 207,50 Km² atau 1,03%.

2. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Provinsi NTB

Kabupaten/Kota Adm.	Luas (km²)	Ibu Kota
Kabupaten Bima	3.405,63 km ²	Woha
Kabupaten Dompu	2.391,54 km ²	Dompu
Kabupaten Lombok Barat	896,56 km ²	Gerung
Kabupaten Lombok Tengah	1.095,03 km ²	Praya
Kabupaten Lombok Timur	1.230,76 km ²	Selong
Kabupaten Lombok Utara	776,25 km ²	Tanjung
Kabupaten Sumbawa	6.643,98 km ²	Sumbawa Besar
Kabupaten Sumbawa Barat	1.849,02 km ²	Taliwang
Kota Bima	222,25 km ²	Bima
Kota Mataram	61,3 km ²	Mataram

Sumber : BPS Provinsi NTB

3. Perekonomian

Sebagian besar perekonomian di NTB didorong oleh aktifitas pertanian, perikanan, kehutanan, dan juga pariwisata. Bahkan laporan badan pusat statistik (BPS) NTB menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2015 tumbuh sebesar 16,51 persen. Struktur perekonomian NTB menurut lapangan usaha pada tahun 2015 didominasi oleh tiga kategori usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 23,09 persen, pertambangan dan penggalian 19,07 persen dan perdagangan besar maupun eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,59 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB yang besar pada tahun 2015 ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat signifikansi yang tinggi pada kategori pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 75,47 persen,

kemudian diikuti sektor jasa keuangan sebesar 9,37 persen dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,23 persen.

B. Gambaran Variabel Penelitian

1. Keadaan dan Perbandingan Volume Usaha Koperasi pada 10 Kabupaten/Kota NTB

Faktor utama yang mendasari untuk mendirikan suatu koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan ekonomi baik itu untuk anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga. Oleh karena itu koperasi melakukan kegiatan usaha koperasi yang mengutamakan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan usaha ini tentu diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi.

Dalam penelitian ini volume usaha merupakan total nilai pendapatan atau penjualan barang maupun jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Jadi volume usaha akan menentukan pendapatan koperasi. Semakin besar jumlah transaksi usaha, semakin besar pula volume usaha yang dijalankan. Secara umum penjualan bagi perusahaan merupakan keberhasilan untuk maju. Hal ini berlaku juga bagi koperasi, terutama yang bergerak dalam bidang pertokoan dan persewaan atau bahkan koperasi tersebut memproduksi jenis barang tertentu.

Berikut daftar perbandingan total volume usaha yang diperoleh koperasi di 10 Kabupaten/Kota NTB pada tahun 2009-2014:

Tabel 4.2
Daftar Perbandingan Volume Usaha yang diperoleh Koperasi di 10
Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Kabupaten/kota	Volume Usaha (Rp Juta)				(%)
	2009	2011	2013	2014	
Lom. Barat	99.957	105.414	104.774	70.081	-33,11
Lom. Tengah	68.322	88.990	140.274	214.671	53,04
Lom. Timur	258.445	229.914	178.991	181.053	1,15
Sumbawa	70.183	71.935	93.103	68.609	-26,31
Dompu	25.581	68.807	585.558	76.598	30,81
Bima	98.623	141.582	187.400	176.583	-5,77
Sum. Barat	22.453	18.092	38.699	74.167	91,65
Lom. Utara	26.263	37.587	45.238	43.520	-3,80
Kota Mataram	195.970	378.418	326.571	298.966	-8,45
Kota Bima	16.541	34.627	441.500	45.635	3,36

Ket: (%)=pertumbuhan, Lom=Lombok, Sum=Sumbawa.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa volume usaha yang diperoleh koperasi di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi NTB dari tahun ke tahun berbeda-beda, ada yang meningkat drastis bahkan ada juga yang merosot tajam. Sumbawa Barat merupakan Kabupaten yang perolehan volume usahanya yang tingkatan volume usahanya naik secara signifikan. Ini terbukti dari perolehan Sumbawa Barat pada tahun 2009 sebesar Rp22.453.000, dan sempat turun pada tahun 2011 sebesar Rp18.092.000. Walaupun sempat turun, akan tetapi peningkatan yang signifikan diperoleh pada tahun 2013 yang mencapai Rp38.699.000 hingga puncak signifikansi diperoleh tahun 2014 dengan besaran yang mencapai hingga Rp74.167.000 atau tumbuh sebesar 91,65 persen. Sementara perolehan atau pertumbuhan volume usaha di kabupaten Lombok Barat menjadi yang terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya. Meskipun memiliki nilai yang tinggi, namun peningkatan cenderung

tidak signifikan. Pada tahun 2009 saja perolehan volume usaha yang diterima sebesar Rp9.9957.000 kemudian meningkat sedikit pada tahun 2011 menjadi Rp105.414.000 dan turun menjadi sebesar Rp104.774.000 pada tahun 2013. Penurunan volume usaha yang drastis diperoleh tahun 2014 yang hanya mencapai Rp70.081.000.

Dengan perolehan ini, koperasi-koperasi yang berada di NTB harus bisa mempertahankan atau meningkatkan pencapaian yang diraih dengan memperluas dan mengoptimalkan usaha yang telah dijalankan. Karena semakin luas usaha yang dijalankan akan memperbanyak kegiatan transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasa, yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan sisa hasil usaha koperasi.

2. Keadaan dan Perbandingan Modal Pinjaman Koperasi pada 10 Kabupaten/Kota NTB

Modal yang terbaik tentunya adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun karena modal sendiri terkadang kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang dilakukan koperasi, maka diperlukan bantuan dari luar sebagai pinjaman modal.

Modal luar atau modal pinjaman adalah modal yang didapatkan dari anggota koperasi, luar koperasi, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal pinjaman ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan atau diangsur disertai bunga.

Berikut daftar perbandingan modal pinjaman yang diperoleh koperasi di Kabupaten/Kota NTB tahun 2009-2014:

Tabel 4.3
Daftar Perbandingan Modal Pinjaman yang diperoleh Koperasi di 10
Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Modal Pinjaman (Juta Rp)				(%)
	2009	2011	2013	2014	
Lom. Barat	39.064	52.393	90.649	107.148	18,20
Lom. Tengah	16.831	31.984	32.255	51.244	58,87
Lom. Timur	109.226	108.019	122.457	104.140	-14,96
Sumbawa	44.632	48.915	4.859	47.749	-1,74
Dompu	29.591	22.629	26.506	38.167	43,99
Bima	33.967	56.667	558.990	54.892	-1,79
Sum. Barat	7.183	8.783	18.863	18.537	9,93
Lom. Utara	16.166	24.089	28.629	24.002	-16,35
Kota Mataram	129.756	189.286	92.885	118.743	-0,74
Kota Bima	7.862	16.564	15.841	17.260	8,96

Ket: (%)= pertumbuhan, Lom=Lombok, Sum=Sumbawa

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perolehan modal pinjaman yang diterima koperasi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB dari tahun ke tahun ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Dari kisaran waktu dari tahun 2009 hingga 2014, Lombok Tengah menjadi kabupten yang paling menonjol dengan perolehan modal luar yang selalu naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2009 jumlah modal luar yang diterima koperasi di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp16.831.000, kemudian meningkat menjadi Rp31.984.000 pada tahun 2011, dan terus naik sebesar Rp32.255.000 pada tahun 2013, sehingga perolehan yang meningkat sangat signifikan diperoleh tahun 2014 yang mencapai besaran Rp51.244.000 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 58,87 persen. Sementara perolehan atau pertumbuhan modal luar paling rendah diperoleh oleh kabupaten Lombok

Utara. Meskipun pada tahun 2009 hingga 2013 terus mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Ini terlihat dari besaran modal luar yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar Rp16.166.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar Rp28.629.000 namun menurun pada tahun 2014 yakni hanya mencapai besaran Rp24.002.000 dengan tingkat pertumbuhan -16,35 persen. Dengan angka raihan ini agar koperasi-koperasi di NTB dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan modal luar yang telah diperoleh untuk meningkatkan usahanya yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan sisa hasil usaha pada koperasi sendiri.

3. Keadaan dan Perbandingan Modal Sendiri pada 10 Koperasi Kabupaten/Kota NTB

Modal koperasi berasal dari modal sendiri, modal luar atau modal pinjaman, modal penyertaan. Modal sendiri dalam penelitian ini adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah atau donasi.

Koperasi harus mampu untuk mengelola usaha dengan bantuan modal sendiri dari anggota. Modal yang lebih dari cukup dan dikelola dengan baik, akan menaikkan pendapatan sehingga laba yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mengetahui apakah koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha dengan baik atau tidak, dapat diketahui melalui rentabilitas modal sendiri (RMS). Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara modal sendiri dengan laba usaha yang digunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dengan persentase.

Berikut daftar total modal sendiri yang diperoleh koperasi Kabupaten/Kota NTB tahun 2009-2014:

Tabel 4.4

Daftar Perbandingan Modal Sendiri yang diperoleh Koperasi di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Modal Sendiri (Juta Rp)				(%)
	2009	2011	2013	2014	
Lom.Barat	27.659	34.352	62.238	74.726	20,06
Lom. Tengah	53.279	57.629	61.003	95.564	56,65
Lom. Timur	75.015	90.962	107.185	118.716	10,76
Sumbawa	26.561	30.627	43.969	48.408	10,10
Dompu	13.875	20.076	55.219	44.715	-19,02
Bima	41.195	52.925	75.335	94.207	25,05
Sum. Barat	4.600	4.894	2.249	23.370	4,10
Lom. Utara	8.913	12.957	20.279	25.066	23,61
Kota Mataram	60.626	77.950	92.885	118.743	27,84
Kota Bima	19.974	24.844	42.004	45.646	8,67

Ket: (%)=pertumbuhan, Lom=Lombok, Sum=Sumbawa

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setiap tahunnya modal sendiri koperasi disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB mengalami fluaktif dengan perolehan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jumlah modal sendiri yang diperoleh oleh koperasi di Kabupaten Lombok Tengah merupakan perolehan yang tertinggi diantara koperasi-koperasi yang berada di Kabupaten/Kota se NTB, dalam kisaran tahun 2009 hingga 2014. Ini terbukti dari kenaikan yang dialami terus menerus sejak tahun 2009 sebesar Rp53.279.000 diikuti tahun 2011 meningkat menjadi Rp57.629.000 hingga terus mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 yakni sebesar Rp61.003.000 dan pada puncak

kenaikan yang sangat signifikan diperoleh tahun 2014 dengan besaran mencapai Rp95.564.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 56,65 persen. Peningkatan perolehan modal sendiri juga diikuti oleh sejumlah kabupaten/Kota di NTB namun tidak terlalu signifikan, bahkan Kabupaten Dompu mengalami penurunan perolehan pada tahun 2014 dengan perolehan sebesar Rp44.715.000 yang berbeda jauh dari tahun sebelumnya sebesar Rp55.219.000 pada tahun 2013 atau dengan kata lain pertumbuhannya -19,02 persen.

Untuk itu diharapkan Koperasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB mampu untuk terus meningkatkan pengelolaan modal sendiri tersebut dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dengan terus mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki sehingga nantinya akan meningkatkan keuntungan atau laba yang tentunya akan meningkatkan sisa hasil usaha.

4. Keadaan dan Perbandingan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Kabupaten/Kota NTB

Sisa hasil usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas jasa modal yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya. Sedangkan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi dari jasa

yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Sisa hasil usaha merupakan yang diperoleh koperasi selama satu tahun setelah dikurangi dengan beban-beban, penyusutan-penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya sisa hasil usaha diperoleh koperasi setiap tahunnya sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara professional. Pengelolaan yang professional akan menumbuhkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga koperasi mempunyai laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan setiap tahunnya dalam RAT masing-masing koperasi.

Berikut daftar sisa hasil usaha yang diperoleh Kabupaten/Kota NTB tahun 2009-2014:

Tabel 4.5

Daftar Perbandingan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB

Kabupate/kota	Sisa Hasil Usaha (Juta Rp)				(%)
	2009	2011	2013	2014	
Lom. Barat	3.315	4.208	6.750	6.304	-6,61
Lom. Tengah	1.982	3.035	2.367	4.673	97,42
Lom. Timur	5.004	6.549	6.130	6.667	8,76
Sumbawa	3.599	4.153	4.957	4.948	-0,18
Dompu	1.481	1.951	6.736	4.323	-35,82
Bima	6.424	8.721	11.783	12.753	8,23
Sum. Barat	859	855	1.907	2.653	46,82
Lom. Utara	1.084	1.533	1.487	1.422	-4,37
Kota Mataram	5.755	6.737	7.731	10.157	31,38
Kota Bima	1.470	3.069	5.962	13.981	134,5

Ket: (%)=pertumbuhan, Lom=Lombok, Sum=Sumbawa

Sumber: Dinas koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi NTB secara umum memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Dalam kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2014, perolehan SHU tertinggi di dapatkan oleh kota Bima dengan pertumbuhan lebih dari seratus persen yakni 134,5 persen. Pertumbuhan yang diperoleh ini mengingat dari tahun ke tahun jumlah SHU yang diperoleh kota Bima selalu meningkat seperti tahun 2013 dengan perolehan SHU hanya sebesar Rp5.962.000 naik menjadi Rp13.981.000 pada tahun 2014. Sementara dari semua Kabupaten/Kota perolehan SHU terendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun yakni dialami oleh koperasi di kabupaten Dompu yang terlihat dari perolehan pada tahun 2013 sebesar Rp6.736.000 kemudian turun menjadi Rp4.323.000 pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan -35,82 persen, meskipun di tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, yakni pada tahun 2009 dengan perolehan sebesar Rp1.481.000 kemudian meningkat menjadi Rp1.951.000 pada tahun 2011. Perolehan yang dicapai ini agar terus ditingkatkan dan juga dipertahankan agar dapat terus menjaga kesejahteraan koperasi dan juga anggota koperasi.